

**LAPORAN PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN DAN
BARANG MILIK NEGARA**

TRIWULAN IV



**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 untuk merumuskan dan mengkoordinasikan standar instrumen pertanian, serta untuk mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) sebagai salah satu unit Eselon-2 dari BSIP, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan

Kegiatan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan BMN pada PSIPKH adalah kegiatan ketatausahaan termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara serta melakukan pengawasan atas tertib administrasi pelaksanaannya agar kebijakan yang telah digariskan bisa mencapai tujuan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran belanja negara antara lain taat pada peraturan perundang-undangan, tidak mewah, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan mencakup kegiatan perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban berdasarkan prinsip pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabel, dan kepastian nilai.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

TUJUAN

1. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pengelolaan barang milik Negara dengan menggunakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
2. Penatausahaan keuangan, perlengkapan dan PNBPN;
3. Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi pada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada Tahun 2023 PSIPKH mendapatkan pagu awal sebesar Rp 7.425.579.000 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 2.846.379.000 dan belanja barang sebesar Rp 4.579.200.000. Belanja barang dibagi menjadi dua yaitu belanja operasional sebesar Rp 3.469.200.000 dan belanja non operasional sebesar Rp 1.110.000.000.

Pada tanggal 10 April 2023 telah dilakukan revisi anggaran kedua dimana total pagu bertambah menjadi Rp 9.711.579.000, belanja non operasional sebesar Rp 3.096.000.000 dan belanja modal sebesar Rp 300.000.000. Pada saat itu juga telah dibuka pagu yang berbintang. Sedangkan revisi anggaran ketiga terjadi pada tanggal 15 April 2023 dimana total pagu menjadi Rp 10.011.579.000, terjadi penambahan sebesar Rp 300.000.000 untuk kegiatan pendampingan kegiatan pekan Nasional. Tanggal 30 Mei 2023 revisi anggaran keempat dimana terjadi perubahan pagu anggaran pada kegiatan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan kemanfaatan instrumen peternakan dan kesehatan hewan, pengelolaan informasi peternakan dan veteriner dan pengelolaan sistem pengendalian intern untuk mendukung pembangunan zona integritas. Revisi kelima terbit pada tanggal 07 Juli 2023 dimana terjadi perubahan pada pagu anggaran kegiatan rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan, perumusan usulan PNPS peternakan dan keswan, penyebarluasan hasil standardisasi instrumen peternakan dan kesehatan hewan dan operasional perkantoran.

Revisi keenam terbit pada 15 September 2023 dimana terdapat penambahan pada belanja modal senilai Rp 700.000.000 untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan. Dan pada tanggal 25 September 2023 terjadi revisi kembali yang ketujuh dimana terdapat perubahan pada kegiatan analisis isu strategis standardisasi peternakan dan kesehatan hewan, rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan, gaji dan tunjangan dan sertifikasi sistem manajemen mutu. Pada 31 Oktober 2023 terjadi revisi kedelapan dimana terdapat penambahan total pagu menjadi Rp 10.775.355.000 yaitu pada Layanan Prasarana Internal (penambahan akun Penggantian Pipa Air Minum sebesar Rp 120.000.000). Revisi kesembilan pada 13 November 2023 dimana terjadi revisi pada akun operasional dan pemeliharaan kantor. Revisi kesepuluh pada 24 November 2023 terjadi penurunan total pagu anggaran menjadi Rp 10.402.313.000 dimana banyak kegiatan yang dikurangi khususnya pada perjalanan dinas. Revisi terakhir pada tanggal 04 Desember 2023 dimana terjadi perubahan pada kegiatan rancangan standar instrumen peternakan dan kesehatan hewan, layanan perkantoran, sinkronisasi dan koordinasi program lingkup

UK, eselon 1 dan stake holders lainnya serta supervisi, koordinasi dan dukungan untuk program strategis Kementerian Pertanian.

Anggaran pada PSIPKH dialokasikan untuk dukungan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian meliputi layanan dukungan manajemen internal dan layanan manajemen kinerja internal, layanan dukungan manajemen internal terdiri dari layanan umum (layanan kerumahtanggaan dan umum) dan layanan perkantoran (gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor). Sedangkan layanan manajemen kinerja internal terdiri dari layanan perencanaan dan penganggaran (penyusunan rencana program dan anggaran) dan layanan manajemen keuangan (pengelolaan keuangan).

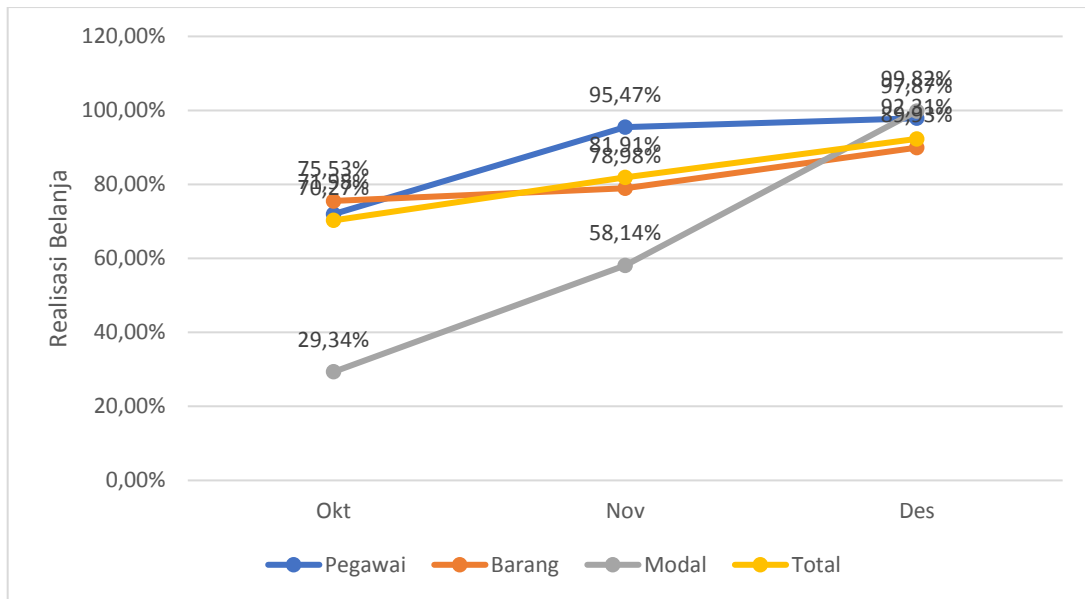
Realisasi belanja pada PSIPKH sesuai dengan OmSpan per 31 Desember 2023 sudah mencapai 92,31% atau sebesar Rp 9.602.609.744 dari total pagu Rp 10.402.313.000, dimana telah dibelanjakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Span per 31 Desember 2023

NO	NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	
1	PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PAGU	2.490.155.000	7.407.472.000	504.686.000	10.402.313.000
		REALISASI	2.437.085.766	6.661.728.650	503.795.328	9.602.609.744
		PERSENTASE	(97,87%)	(89,93%)	(99,82%)	(92,31%)
		SISA	53.069.234	745.743.350	890.672	799.703.256

Penerbitan SPM selama Triwulan IV sebanyak 59 SPM terdiri dari SPM uang makan PNS dan PPPK, Uang Lembur PNS dan PPNPN, Penggantian Uang (GU) dan GU Nihil, honor PPNPN, pembayaran paket meeting dan bahan pendukung, LS perjalanan dinas, pembangunan drainase, tagihan listrik, air dan internet.

Perkembangan realisasi per jenis belanja PSIPKH disajikan pada Gambar 1. Semua jenis belanja realisasinya sudah melewati 85%. Realisasi belanja pegawai 97,87% dari pagu Rp 2.490.155.000 menunjukkan normal. Realisasi belanja barang sudah mencapai 89,93% dari pagu Rp 7.407.472.000. Dan belanja modal sudah terealisasi 99,82%.



Gambar 1. Perkembangan realisasi per jenis belanja PSIPKH Triwulan IV

Belanja pegawai digunakan untuk belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan suami/istri PNS, belanja tunjangan anak PNS, belanja tunjangan struktural PNS, belanja tunjangan fungsional PNS, belanja tunjangan PPh PNS, belanja tunjangan beras PNS, belanja uang makan PNS, belanja tunjangan umum PNS, belanja gaji pokok PPPK, belanja pembulatan gaji PPPK, belanja tunjangan suami/istri PPPK, belanja tunjangan anak PPPK, belanja tunjangan struktural PPPK, belanja tunjangan fungsional PPPK, belanja tunjangan beras PPPK, belanja uang makan PPPK dan belanja uang lembur. Pada Tabel 2 dapat dilihat perkembangan realisasi pada belanja pegawai.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi pada belanja pegawai Triwulan IV

Kode	Akun	Pagu	Oktober		November		Desember	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
511111	Belanja gaji pokok	1.620.580.000	1.392.541.980	85,93	1.615.606.180	99,69	1.615.606.180	99,69
511119	Belanja pembulatan gaji	25.000	20.484	81,94	23.440	93,76	23.440	93,76
511121	Belanja tunj suami/istri	112.026.000	96.253.520	85,92	111.976.210	99,96	111.976.210	99,96
511122	Belanja tunj anak	29.852.000	25.864.806	86,64	29.689.886	99,46	29.689.886	99,46
511123	Belanja tunj struktural	63.140.000	54.120.000	85,71	63.140.000	100,00	63.140.000	100,00
511124	Belanja tunj fungsional	170.178.000	151.214.000	88,86	169.872.000	99,82	169.872.000	99,82
511125	Belanja tunj PPh	12.838.000	11.850.477	92,31	12.769.561	99,47	12.769.561	99,47
511126	Belanja tunj beras	84.225.000	72.637.260	86,24	84.079.620	99,83	84.079.620	99,83
511129	Belanja uang makan	202.208.000	148.208.000	73,29	165.082.000	81,64	198.217.600	98,03
511151	Belanja tunj umum	45.435.000	38.865.000	85,54	45.065.000	99,19	45.065.000	99,19
511611	Belanja gaji pokok PPPK	36.543.000	11.866.000	32,47	23.732.000	64,94	23.732.000	64,94
511619	Belanja pembulatan gaji PPPK	2.000	158	7,90	419	20,95	419	20,95

511621	Belanja tunj suami/istri PPPK	4.154.000	1.186.600	28,57	2.076.550	49,99	2.076.550	49,99
511622	Belanja tunj anak PPPK	810.000	118.660	14,65	237.320	29,30	237.320	29,30
511624	Belanja tunj fungsional PPPK	7.440.000	2.120.000	28,49	4.240.000	56,99	4.240.000	56,99
511625	Belanja tunja beras PPPK	2.752.000	724.200	26,32	1.375.980	50,00	1.375.980	50,00
511628	Belanja uang makan PPPK	11.135.000	1.480.000	13,29	3.034.000	27,25	5.635.100	50,61
512211	Belanja uang lembur	86.812.000	39.806.000	45,85	45.330.000	52,22	69.348.900	79,88
	TOTAL	2.490.155.000	2.048.877.145	82,28	2.377.330.166	95,47	2.437.085.766	97,87

Belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang dibagi menjadi dua yaitu belanja barang non operasional dan operasional. Pagu total belanja barang sebesar Rp 7.407.472.000, dimana pagu belanja barang non operasional sebesar Rp 3.938.272.000 dan pagu belanja barang operasional sebesar Rp 3.469.200.000.

Belanja non operasional meliputi kegiatan standarisasi produk, sosialisasi dan diseminasi, layanan hubungan masyarakat, layanan umum, layanan manajemen SDM internal dan layanan manajemen kinerja internal. Belanja non operasional sudah terealisasi selama Triwulan IV sebesar 83,09% dari total pagu Rp 3.938.272.000, dimana semua kegiatan sudah terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi pada Belanja Non Operasional Triwulan IV

Akun	Pagu	Oktober		November		Desember	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Analisis isu strategis SPKH	150.038.000	144.002.868	95,98	145.559.368	97,02	149.849.368	99,87
Rancangan Standar IPKH	1.116.170.000	959.673.003	85,98	1.093.668.416	97,98	1.112.597.416	99,68
Perumusan Usulan PNPS PKH	87.261.000	86.409.150	99,02	86.409.150	99,02	86.409.150	99,02
Penyebarluasan Hasil SIPKH	129.363.000	128.201.780	99,10	129.201.780	99,88	129.201.780	99,88
Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pengelolaan Limbah Peternakan dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Padi dan Jagung	650.000.000	-	-	-	-	-	-
Pendampingan Kegiatan PeNas	295.910.000	295.869.397	99,99	295.869.397	99,99	295.869.397	99,99
Pengelolaan Ketatausahaan dan RT	119.500.000	91.437.847	76,52	100.085.347	83,75	119.488.847	99,99
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	15.000.000	1.000.000	6,67	1.000.000	6,67	15.000.000	100,00
Koordinasi Kerjasama Pengelolaan Sistem IPKH	48.800.000	31.925.230	65,42	37.997.730	77,86	46.238.730	94,75

Pengelolaan Informasi Peternakan dan Veteriner	92.001.000	64.825.740	70,46	87.263.676	94,85	91.981.176	99,98
Peningkatan Kemanfaatan IPKH	134.100.000	86.047.677	64,17	103.412.677	77,12	133.238.677	99,36
Pengelolaan Adm. Kepegawaian	151.700.000	81.396.349	53,66	94.645.874	62,39	151.141.874	99,63
Sinkronisasi dan Koordinasi Program Lingkup UK. Eselon I dan Stakeholders lainnya	196.447.000	159.074.039	80,98	171.976.539	87,54	192.352.039	97,92
Pengelolaan Program dan Anggaran	131.212.000	92.113.070	70,20	110.197.960	88,72	130.938.460	99,79
Supervisi, Koordinasi dan Dukungan untuk Program Strategis Kementerian Pertanian	285.463.000	214.292.670	75,07	247.495.530	84,62	284.857.530	99,79
Pengelolaan Movev	86.091.000	65.725.175	76,34	73.855.175	85,79	85.879.811	99,75
Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern untuk Mendukung Pembangunan ZI	36.666.000	34.481.350	94,04	36.052.350	98,33	36.052.350	98,33
Koordinasi dan Pelaporan Standardisasi Emisi GRK untuk Sub Sektor Peternakan	24.000.000	17.190.500	71,63	17.821.250	74,26	22.739.250	94,75
Pembangunan ZI untuk Mendukung Reformasi Birokrasi	88.500.000	23.422.500	26,47	65.561.000	74,08	88.368.000	99,85
Pengelolaan Adm. Keuangan. Perlengkapan dan BMN	100.050.000	75.850.186	75,81	78.515.186	78,48	99.913.186	99,86
TOTAL	3.938.272.000	2.652.938.531	67,36	2.976.588.405	75,58	3.272.117.041	83,09

Belanja operasional dan pemeliharaan kantor terdiri dari kebutuhan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan perkantoran, langganan daya dan jasa serta pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran. Dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan Realisasi pada Belanja Operasional

No	Kegiatan	Pagu	Oktober		November		Desember	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Kebutuhan Sehari hari Perkantoran	1.528.435.000	1.124.695.682	73,58	1.324.551.682	87,23	1.479.079.982	96,77
2	Pemeliharaan Perkantoran	1.202.855.000	834.102.362	69,34	916.827.406	79,94	1.184.924.329	98,51
3	Langganan Daya dan Jasa	398.048.000	320.750.175	80,58	351.912.434	75,84	394.627.398	99,14
4	Pembayaran Operasional Perkantoran	339.862.000	252.736.900	74,36	280.337.900	82,49	330.979.900	97,39
TOTAL		3.469.200.000	2.532.285.119	72,99	2.873.629.422	82,83	3.389.611.609	97,71

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi layanan sarana internal dan prasarana internal. Pagu belanja modal sebesar Rp 504.686.000 yang terdiri dari layanan sarana internal untuk perangkat multimedia

mendukung komunikasi AOR sebesar Rp 180.000.000 dan perangkat pengolah data sebesar Rp 113.400.000. Sedangkan layanan prasarana internal terdiri dari pengaspalan jalan sebesar Rp 21.286.000 dan pembangunan drainase sebesar Rp 190.000.000. Belanja modal sudah terealisasi sebesar 99,82%.

2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Belanja operasional terdiri dari belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan perkantoran, langganan daya dan jasa serta pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran.

1. Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran meliputi :

a. Belanja keperluan perkantoran :

- Langganan surat kabar dan majalah : langganan surat kabar an. Pepen Agency dan langganan koran Sinar Tani an. Tabloid Sinar Tani.
- Pencetakan, penerbitan, penggandaan, laminasi, fotocopi : pembuatan spanduk BSIP, pembuatan stempel PPK, percetakan SPD dan kwitansi perjalanan dan fotocopy lainnya.
- Langganan bonet dan internet : tagihan internet dan IT Technical Support an. PT. Usaha Adi Sanggoro.
- Biaya keanggotaan publikasi internasional;
- Keperluan sehari-hari perkantoran : pembayaran pengharum ruangan, pembelian keperluan Kapus, pembelian kunci dan sebagainya.
- Pakaian dinas pegawai/perawat an. BAHAR Master Tailor.
- Atribut/kelengkapan pakaian dinas : pembelian atribut an. Mandiri Percetakan.
- Pakaian kerja pengemudi/petugas kebersihan/pramubakti/pesuruh an. BAHAR Master Tailor.
- Pakaian kerja satpam : pembelian kelengkapan satpam an. Toko Cilandak.
- Pakaian olahraga an. PT. Graha Mega Sinergi.
- Pakaian dinas lapang pegawai an. BAHAR Master Tailor.
- Honorarium satpam dan pengemudi;
- Honorarium petugas kebersihan dan pramubakti;
- Pembelian materai, an. Pos Indonesia.
- Uang lembur satpam, petugas kebersihan dan pramubakti;
- Uang makan lembur satpam, petugas kebersihan dan pramubakti;
- Bahan pendukung keperluan perkantoran habis pakai : pembelian paket sembako, pembelian pot hias dan sebagainya.

- b. Belanja barang operasional-penanganan pandemi COVID 19 :
 - Masker kesehatan : pembelian masker merk Sensi an. PT. Graha Mega Sinergi.
 - c. Belanja sewa : sewa mesin fotocopy an. Toshiba Jaya Service
2. Belanja pemeliharaan perkantoran meliputi :
- a. Belanja barang operasional lainnya : upah harian lepas an. Dicky dkk.
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan :
 - Pemeliharaan/penggantian jaringan air minum : biaya pemel. jaringan air minum an. TB. Arzimar Jaya.
 - Pemeliharaan/penggantian jaringan listrik : pembelian peralatan dan pemeliharaan listrik an. Toko Cahaya Elektrik.
 - Pemeliharaan gedung/bangunan kantor tidak bertingkat : biaya pemeliharaan pengecatan gedung an. CV. Rajawali Jaya Sakti, backdrop ruang kerja Kapus, an. PT. Fiqia Elean Global dan pembuatan papan nama BSIPKH an. CV. Mitra Mulya Utama.
 - Pemeliharaan halaman gedung/bangunan kantor : pemeliharaan halaman kantor an. CV. Inayatullah.
 - Pemeliharaan/perbaikan lanscape internal : biaya pemotongan pohon an. CV. Inayatullah, pemeliharaan landscape an. Cempaka Flora.
 - c. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin :
 - Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas pejabat Eselon II : penggantian BBM an. Pertamina serta jasa poles/salon luar dan dalam an. RJS Steam & poles mobil.
 - Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4 : penggantian BBM an. Pertamina, pembayaran pajak kendaraan roda empat an. Samsat dan pembelian oli mesin dan compressor AC an. Lani Autopart.
 - Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional lapangan (double gardan) : penggantian BBM an. Pertamina, pembelian filter sensor an. Lani autopart, dan sebagainya
 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 : penggantian BBM an. Pertamina, pembayaran pajak tahunan an. Samsat, pembelian oli mesin dan beli suku cadang dinamo an. Sentromoto.
 - Pemeliharaan mesin potong rumput.
 - Pemeliharaan AC split : pemeliharaan AC an. DAFFUR TEKNIK.
 - Pemeliharaan Generator : pembelian BBM genset an. Pertamina.
 - Pemeliharaan alat audio visual, infocus an. Empang Jaya.

- Pemeliharaan personal komputer/notebook : pemeliharaan komputer an. Visi Computer.
 - Pemeliharaan printer an. Visi Computer.
 - Suku cadang komputer (komputer/laptop) : pembelian suku cadang komputer an. Belilepi computer.
 - Pemeliharaan jaringan internet (LAN).
 - Pemeliharaan CCTV dan runing tex
 - Pemeliharaan inventaris kantor : biaya perbaikan kursi loby an. Pa Neneng Nurdin, biaya cuci karpet an. Okey wash, dan penggantian jok kursi an. Adiraka Saudara.
3. Belanja langganan daya dan jasa meliputi :
- a. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat, pengiriman dokumen kepegawaian an. JNE.
 - b. Belanja langganan listrik : pembayaran listrik melalui BTN.
 - c. Belanja langganan telepon : pembayaran telepon melalui BTN.
 - d. Belanja langganan air : pembayaran air melalui BTN, Bank Jabar Banten dan Perum Tirta Pakuan.
 - e. Belanja langganan daya dan jasa lainnya : pembayaran gas alam melalui BTN.
4. Belanja pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran meliputi :
- a. Belanja keperluan perkantoran : jamuan tamu, biaya konsumsi makan dan snack an. Imah Kue.
 - b. Belanja penambah daya tahan tubuh : biaya penguat satpam, biaya konsumsi senam an. KPRI Aneka Usaha.
 - c. Belanja honor operasional satuan kerja : honorarium pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, bendahara pengelola PNBP, staf pengelola, Pemegang Uang Muka Kerja, honor penanggung jawab SAPP, honor koordinator SAPP dan honor anggota SAPP.
 - d. Belanja honor output kegiatan : honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.
 - e. Belanja jasa profesi: pemeriksaan kesehatan pegawai oleh PT. Prodia Widyahusada.
- Realisasi selama Triwulan IV pada belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran dibayarkan untuk honorarium pengelola keuangan dan SAPP, pembayaran langganan listrik, keperluan *cleaning service*, pemeliharaan halaman kantor, biaya jamuan tamu, biaya sewa mesin fotocopy, Honorarium PPNPN 2023 dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rincian Realisasi pada Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Akun	Pagu	Oktober		November		Desember	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
Kebutuhan Sehari hari Perkantoran	1.528.435.000	1.124.695.682	73,58	1.324.551.682	87,23	1.479.079.982	96,77
Belanja Keperluan Perkantoran	1.486.540.000	1.085.804.930	73,04	1.284.160.930	86,97	1.437.189.230	96,68
Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi	23.895.000	23.890.752	99,98	23.890.752	99,98	23.890.752	99,98
Belanja Sewa	18.000.000	15.000.000	83,33	16.500.000	91,67	18.000.000	100,00
Pemeliharaan Perkantoran	1.202.855.000	834.102.362	69,34	916.827.406	79,94	1.184.924.329	98,51
Belanja Barang Operasional Lainnya	38.880.000	28.960.000	74,49	32.160.000	87,01	38.880.000	100,00
Belanja Pemel Gedung dan Bangunan	632.978.000	492.471.45	77,80	510.942.775	87,50	632.977.244	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	530.997.000	312.670.927	58,88	373.724.631	71,05	513.067.085	96,62
Langganan Daya dan Jasa	398.048.000	320.750.175	80,58	351.912.434	75,84	394.627.398	99,14
Belanja pengiriman surat dinas pos	1.500.000	162.000	10,80	180.000	12,00	180.000	12,00
Belanja Langganan Listrik	208.305.000	167.064.176	80,20	185.402.635	77,80	208.275.344	99,99
Belanja Langganan Telepon	8.042.000	6.424.808	79,89	6.424.808	79,89	7.708.663	95,86
Belanja Langganan Air	170.737.000	140.210.941	82,12	153.016.741	74,02	170.715.141	99,99
Belanja Langganan Daya dan Jasa	9.464.000	6.888.250	72,78	6.888.250	72,78	7.748.250	81,87
Pembayaran Operasional Perkantoran	339.862.000	252.736.900	74,36	280.337.900	82,49	330.979.900	97,39
Belanja Keperluan Perkantoran	55.902.000	37.544.000	67,16	50.206.000	89,81	55.846.000	99,90
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	66.804.000	37.870.500	56,69	39.219.500	58,71	58.661.500	87,81
Belanja Honor Operasional Satker	143.874.000	106.764.000	74,21	119.674.000	83,18	143.874.000	100,00
Belanja Jasa Profesi	68.202.000	68.199.900	100,00	68.199.900	100,00	68.199.900	100,00
Belanja Honor Output Kegiatan	4.080.000	2.040.000	50,00	2.720.000	66,67	4.080.000	100,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	318.500	31,85	318.500	31,85	318.500	31,85
TOTAL	3.469.200.000	2.532.285.119	72,99	2.873.629.422	82,83	3.389.611.609	97,71

3. Pengukuran Ulang Tanah PSIPKH

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki lahan seluas 95.419 m² yang termuat dalam Hak Pakai Sertifikat No 25, Surat Ukur No 690 Tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi setelah sebagian diproses menjadi rumah dinas golongan 3 yang sudah bersertifikat, sehingga perlu dilakukan pengecekan secara fisik kembali luasan tanah.

Biaya yang diperlukan berasal dari DIPA Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Belanja Jasa Profesi	5	OJ	1.000.000	5.000.000
2.	Belanja Bahan Palang dan Patok	1	paket	10.000.000	10.000.000

3.	Belanja Bahan Konsumsi	1	paket	3.756.200	3.756.200
4.	Belanja Barang Konsumsi	1	paket	3.000.000	3.000.000
5.	Belanja Perjalanan Dinas	30	OJ	300.000	9.060.000
6.	Jasa Lainnya Pengukuran Tanah	1	paket	19.183.800	19.183.800
	Jumlah				50.000.000

Kegiatan pengukuran ulang lahan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan mulai tanggal 4 September 2023 sampai tanggal 20 Desember 2023. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Mengadakan pertemuan dengan Kelurahan Babakan, Ketua RW, Para Ketua RT setempat untuk menginformasi pengukuran ulang lahan PSIPH sekaligus memohon bantuan untuk pendampingan dalam pengukuran ulang lahan.
2. Berkonsultasi dan berkoordinasi ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor terkait dokumen-dokumen permohonan pengukuran ulang lahan yang harus dipersiapkan.
3. Mengadakan Sosialisasi Pengukuran Ulang Lahan dengan Narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor.
4. Pemangkasan pohon-pohon yang nantinya diperkirakan akan mengganggu sinyal ketika dilakukan pengukuran ulang.
5. Pelaksanaan pengukuran ulang lahan PSIPKH yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional ulang dan didampingi dan disaksikan oleh pihak Kelurahan, Ketua RW dan Para Ketua RT setempat.

Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor sebagai berikut :

1. Pengukuran dilakukan berdasarkan pengukuran titik dengan batas-batas bidang tanah, tembok dan patok.
2. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengolahan data berikut (batas bidang tanah dan luas berbeda dengan batas dan luas pada surat ukur Nomor 329/1983 sehingga luas awal 106.795 m² berubah menjadi 109.967 m². Perbedaan ini dikarenakan adanya penunjukan batas baru dan bidang tanah yang terbit sebagian di luar batas sertifikat awal.
3. Berdasarkan hasil identifikasi dapat diketahui bahwa di atas hak pakai tersebut telah diterbitkan hak atas tanah seluas 106.795 m² yang tercatat pada pencatatan buku tanah. Bidang tanah yang diterbitkan 60 bidang seluas 11.376 m² dan yang tidak tercatat pada pencatatan buku tanah diterbitkan 27 bidang seluas 4.904 m². Dengan demikian ada perbedaan data pencatatan dalam buku tanah hak pakai tersebut.
4. Berdasarkan point 2 dan 3 di atas bahwa luas awal sertifikat hak pakai adalah 106.795 m². Setelah dilakukan pengukuran ulang luas menjadi 109.967 m², dan telah diterbitkan masing-masing sertifikat dengan jumlah 60 seluas 11.376 m², dan yang tidak tercatat

pada pencatatan buku tanah diterbitkan 27 bidang seluas 4.904 m², sehingga sisa luas tanah pada sertifikat hak pakai nomor 25 adalah 93.687 m².

Laporan Kegiatan pengukuran ulang tanah PSIPKH dan realisasi anggaran sudah disampaikan ke Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023.

4. Perpanjangan Sewa Sebagian Lahan PSIPKH untuk Tower

Perjanjian sewa menyewa sebagian tanah PSIPKH seluas 150 m² untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung Nomor : PKS 881/LG.05/KV-05/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 sesuai Berita Acara Kesepakatan bahwa jangka waktu pemanfaatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2024. Sewa sebagian tanah milik PSIPKH akan berakhir tanggal 21 Januari 2024. Oleh karena itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115PMK.06/2020 dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. Pengelola BMN PSIPKH sudah berkoordinasi dengan pihak penyewa terkait perpanjangan dan mengajukan perpanjangan sewa sebagian tanah untuk tower telekomunikasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun. Selanjutnya di awal bulan Januari 2024 akan dilakukan survey lapangan guna menilai nilai sewanya.

5. Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja

Audit kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama 9 hari dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023. Sampai akhir bulan Desember 2023 Laporan Hasil Audit (Buku Merah) belum terbit. Namun demikian hasil audit berupa pengembalian belanja sebesar Rp. 40.157.776 seluruhnya sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 21 Nopember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit sudah disiapkan/diselesaikan oleh Tim Pengelola Anggaran PSIPKH.

KESIMPULAN

Realisasi belanja pada PSIPKH sesuai dengan OmSpan per per 31 Desember 2023 sudah mencapai 92.31% atau sebesar Rp 9.602.609.744 dari total pagu Rp 10.402.313.000 sesuai dengan Kartu Pengawasan (Karwas). Penerbitan SPM pada bulan Desember 2023 sebanyak 17 SPM.

Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki luas lahan seluas 95.419 m² yang termuat dalam Hak Pakai Sertifikat No 25, Surat Ukur No 690 Tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi setelah sebagian diproses menjadi rumah dinas golongan 3 yang sudah bersertifikat, sehingga perlu dilakukan pengecekan secara fisik kembali luasan tanah. Biaya yang diperlukan berasal dari DIPA Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

Perjanjian sewa menyewa sebagian tanah PSIPKH seluas 150 m² untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung sesuai Berita Acara Kesepakatan bahwa jangka waktu pemanfaatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2024. Pengelola BMN PSIPKH sudah berkoordinasi dengan pihak penyewa terkait perpanjangan dan mengajukan perpanjangan sewa sebagian tanah untuk tower telekomunikasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun. Selanjutnya di awal bulan Januari 2024 akan dilakukan survey lapangan guna menilai nilai sewanya.

Audit kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama 9 hari dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023. Sampai akhir bulan Desember 2023 Laporan Hasil Audit (Buku Merah) belum terbit. Namun demikian hasil audit berupa pengembalian belanja sebesar Rp. 40.157.776 seluruhnya sudah disetor ke Kas Negara.